

LAPORAN RENCANA KERJA TRIWULAN IV DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2025



Network: 9 Des 2025 12.54.20 WIB
Local: 9 Des 2025 12.54.19 WIB
1°21'13,65"S 100°34'22"

Painan, Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) triwulan IV tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Renja triwulan IV tahun 2025 Dinas Pertanian ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Perubahan Renja triwulan IV tahun 2025 ini berisikan informasi tentang kinerja pembangunan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner selama triwulan IV tahun 2025, kendala/permasalahan yang ada dan upaya pemecahannya.

Demikian Laporan Renja triwulan IV tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.



Painan, 19 Januari 2026
Pjh. Kepala Dinas,

HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL.....	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Tujuan Evaluasi Renja.....	6
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.	7
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	10
BAB IV PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	19
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Rekomendasi.....	26
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	8
Tabel 3.1	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026...	17
Tabel 3.2	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029...	18
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 3.4	Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) tahun 2022-2025.....	21
Tabel 3.5	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 - 2024.....	21
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian.....	23
Tabel 3.7	Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintah. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh perangkat daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi Renja tahun 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja perangkat daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappedalitbang.

Kemudian Kepala Bappedalitbang melaporkan hasil pemantauan

dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan dan hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja tahun 2026.

Tahun anggaran 2025 merupakan masa transisi dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 ke RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029. Untuk pelaporan Renja Tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sampai triwulan III tahun 2025, dan untuk triwulan IV tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 13) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
- 25) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 27) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
- 28) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 29) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27);
- 31) Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

- 32) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 33) Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/185/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
- 34) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/414/Distan/2025 tanggal 04 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900.1.3/21/Distan/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Tujuan Evaluasi Renja

Tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tercantum dalam Renja tahun 2025, guna:

- 1) Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja tahun 2025 dan RPJMD tahun 2021-2026;
- 2) Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja tahun 2025 serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Renstra adalah pedoman yang digunakan setiap lembaga/institusi untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan. Renstra memuat tujuan, tata nilai, dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapainya. Renstra yang disusun dengan baik dapat memainkan peran penting untuk mencapai tujuan, visi dan misi, karena ia memberi tahu semua pihak cara merespon peluang, tantangan, tujuan, dan sasaran yang realistis. Renstra berfungsi untuk memberikan panduan kerja, menentukan capaian dan strategi, Renstra merupakan living dokumen, yang dapat digunakan untuk dijadikan acuan apakah rencana yang sudah ditetapkan tercapai atau belum.

Untuk mengetahui capaian Renstra tersebut tercapai atau belum, maka perlu dilakukan evaluasi capaian Renstra untuk mengukur keberhasilan tata kelola yang sudah dilakukan lembaga, selanjutnya dilakukan perbaikan pengendalian dan pengembangan atau peningkatan. Tahun anggaran 2025 merupakan masa transisi dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 ke RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029. Untuk pelaporan Renja Tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sampai triwulan III tahun 2025, dan untuk triwulan IV tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 Evaluasi hasil pelaksanaan program pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Outlook 2021	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke				Ket
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN												
		3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
I	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	91,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	0	20	20	20	20	20	20	20	20	15,00	
				PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)	0	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
				JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH	0	0	0	0	0,54	0,50	0	0	0	0,65	
				PERSENTASE KINERJA BIDANG/SEKRETARIAT YANG DICAPAI (%)	0	0	0	0	90	91	0	0	0	98,22	
				JUMLAH INOVASI (INOVASI)	0	0	0	0	1	7	0	0	0	1	
IV	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	468.149	503.846	514.094	524.579	535.308	546.287	503.846	487.867	487.867	0	
				PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	50,75	52,88	53,14	53,49	53,61	53,72	47,21	31,28	19,30	0	
				PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KW/HA)	58,14	68,92	70,17	71,47	72,53	73,62	68,92	61,60	56,92	0	
				PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)	7,00	27,31	28,00	28,70	29,41	30,15	27,31	26,19	31,15	0	
V	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN (PERSENTASE)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0,77	
				PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	0	0	0	0	0,50	0,50	0	0	0	6,40	
				PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN (%)	0	0	0	0	2,80	3,10	0	0	0	1,68	
				PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS	0	0	0	0	1	1,50	0	0	0	(2,59)	
				PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (Kw/ha)	0	0	0	0	58,06	59,22	0	0	0	63,67	
VI	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	468.149	503.846	514.094	524.579	535.308	546.287	503.846	487.867	487.867	0	
				JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	1,30	1,62	1,70	1,79	1,88	2,00	1,62	1,63	1,78	0	
				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)	0	0	25	25	25	25	0	25	25	12,50	
				PERSENTASE PENGADUAAAN/ SARAN SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	0	0	25	25	25	25	0	25	25	12,50	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan	Outlook 2021	Target Tahun ke					Realisasi Tahun ke				Ket
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VII	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B (HA)	0	0	0	0	22.746,10	22.746,10	0	0	0	22.746	
				LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/ KAWASAN PERTANIAN PANGAN	0	0	0	0	22.746,10	22.746,10	0	0	0	22.746	
				JUMLAH LUAS LAYANAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI DAN DITINGKATKAN (HEKTAR)	0	0	0	0	500	500	0	0	0	50	
				INDEKS PERTANAMAN (ANGKA)	0	0	0	0	2	1,85	0	0	0	1,65	
VIII	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	2,32	3,87	4,28	4,47	4,68	4,91	2,77	-0,82	4,52	0	
				PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK	100	20	20	20	20	20	20	20	20	15	
IX	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (%)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	
				TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) (%)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR (%)	0	0	0	0	3,55	3,69	0	0	0	4,73	
				PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER (PERSENTASE)	0	0	0	0	21,43	28,57	0	0	0	21,43	
X	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	100	20	20	20	20	20	20	20	20	0	
XI	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN (PERSENTASE)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	
				PERSENTASE PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	
XII	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	30	30	32	34	37	40	30	32	0	5,05	
XIII	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN (PERSENTASE)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	
XIV	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	25	219	100	100	100	100	219	100	130	0	
				JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	
XV	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN (PERSENTASE)	0	0	0	0	13,10	20,78	0	0	0	13,10	
				PERSENTASE KELEMBAGAAN KOPERASI TANI YANG DIBENTUK DAN BEROPERASI	0	0	0	0	80	80	0	0	0	80	
				PERSENTASE PENYULUH PERTANIAN YANG MEMILIKI NILAI EVALUASI KINERJA BAIK (%)	0	0	0	0	100	100	0	0	0	100	

Sumber : Bagian Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Pada tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan periode tahun 2025-2029, maka evaluasi Renstra tahun 2021-2026 hanya dilakukan sampai kondisi triwulan III tahun 2025 dan Renstra tahun 2025-2029 dievaluasi mulai pada triwulan IV tahun 2025 (warna kuning).

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.19.867.774.341 mendapatkan penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.835.355.995 dengan realisasi sampai triwulan IV sebesar Rp.18.498.426.190 atau sebesar 98,21% (Laporan Evaluasi Renja pada lampiran).

2.2.1 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Dinas Pertanian	A (89,98)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	91
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,16 Triliyun

A. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator sasaran strategis ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian. Target indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 99,47% yaitu dari target (A) 89,98 tercapai 89,50 (data capaian tahun 2024), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renja serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja dengan KUA-PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.18.171.498.375 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.17.139.080.029 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV Rp.16.890.801.788 atau 98,55%.

B. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian. Target indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 101,10% yaitu dari target 91 tercapai 92 (data capaian tahun 2025), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian

sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja dengan KUA-PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini bertujuan mendukung tercapainya kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, persentase kinerja bidang yang tercapai dan jumlah inovasi Dinas Pertanian. Nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.5.168.662 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.5.168.662 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV Rp.0 atau 0%. Tidak terealisasi anggaran karena kuota peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk petugas Insemintor Buatan (IB) tidak terpenuhi. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan SDM petugas.

C. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Triliyun). Target kinerja indikator kinerja ini adalah 100%, tingkat capaian 97,78% yaitu dari target 3,10 triliyun tercapai 3,09 triliyun (data capaian Tahun 2024), yang meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renja serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renja dengan KUA-PPAS.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi pertanian, persentase kelompok tani yang menerapkan sop (standar operasional prosedur) budidaya pertanian, produktivitas pertanian per hektar per Tahun dan persentase ternak unggul. Nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.128.110.150 nilai pagu sebesar Rp.128.110.150 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.117.772.974 atau 91,93%.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. Nilai Renja Tahun 2025 sebesar Rp.970.967.800 nilai pagu anggaran sebesar Rp.970.967.800 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV sebesar Rp.951.122.253 atau 97,96%.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis dan pengawasan hewan dan produk hewan. Nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.24.469.910 nilai pagu anggaran sebesar Rp.24.469.910 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.19.996.400 atau 81,72%.

d) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pertanian yang memiliki izin usaha di sektor pertanian. Nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.33.296.226 nilai pagu anggaran sebesar Rp.33.296.226 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.26.544.395 atau 79,72%.

f) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Kelompok Tani naik kelas sebanyak 100 (seratus) unit dan Balai Penyuluh Pertanian yang naik kelas sebanyak 1 (satu) unit. Nilai Renja tahun 2025 sebesar Rp.534.263.218 nilai pagu anggaran sebesar Rp.534.263.218 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp.492.188.380 atau 92,12%.

BAB III
PEMBAHASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
PERTANIAN DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 520/186/Kpts/DISTAN-PS/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Penetapan IKU Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu :

- a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk menentukan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian adalah Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.
- b) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian
Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka

inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah. Untuk menentukan Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian adalah hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA

c) Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB. Untuk menentukan Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Target dan capaian realisasi IKU Dinas Pertanian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN KE						REALISASI TAHUN KE						RASIO REALISASI TAHUN KE					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	91,89 (AA)	88,77 (A)	88,92 (A)	89,50 (A)	0	0	104,18	100,15	99,81	99,97	0	0
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	0	85	100	100	100	100	0	85	92	90	0	0	0	100	92	90	0	0
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Trilyun	2,90	2,98	3,04	3,10	3,16	3,23	2,90	2,98	3,05	3,09	0	0	100	100	100,33	99,65	0	0	
Rata-Rata																		102,09	100,05	97,38	96,54	-		

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Tabel 3.2
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO REALISASI TAHUN KE				
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel,	Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	89,98 (A)	90,43	90,88	91,34	91,79	89,50 (A)	0	0	0	0	99,47	0	0	0	0
				Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	91	92	93	94	95	92	0	0	0	0	101,10	0	0	0	0
2	Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	berdaya saing dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan petani		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK	Rupiah	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.090.000.000.000	0	0	0	0	97,78	0	0	0	0
Rata-Rata																	99,45	0	0	0	0

Catatan : Data capaian Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2025 Memakai Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Dari Tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian IKU sementara Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebesar 99,45% dengan prediket sangat baik. Capaian tertinggi pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah yaitu sebesar 101,10% dan yang terendah adalah sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian dengan indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK yaitu sebesar 97,78%.

3.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu IKD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian IKD berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan IKD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan IKD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi :

- a) Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah; dan
- b) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi IKK dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum, dan aspek Daya Saing Daerah.

- a) Indikator Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan

sosial. Indikator Kinerja Makro Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat seperti Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Outlook 2021	Target Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)		70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92
	b. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
	c. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57
	d. Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp/org/thn	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,55	2,89	4,14	4,52	4,62	4,74
3	PDRB ADHK	Rp. Trilyun	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
4	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	19,69	20,05	20,66	21,37	22,12	22,94
5	Indek Gini		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30
7	Tingkat Kemiskinan	%	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
8	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	38,43	38,25	38,03	37,78	37,51	37,21

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara langsung mendukung pencapaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat (Indikator Kinerja Makro Ekonomi) yaitu PDRB ADHK, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merepresentasikannya ke dalam target kinerja perangkat daerah yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK). Target dan realisasi nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
 Realisasi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)
 Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025*
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Triliyun	2,98	3,05	3,09	3,09

Catatan :* : Data Capaian Tahun 2024

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.4 diatas dapat diuraikan bahwa nilai PDRB Sektor Pertanian tahun 2022 sebesar 2,98 triliyun, tahun 2023 sebesar 3,05 triliyun, tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 3,09 triliyun (angka capaian tahun 2025 memakai capaian tahun 2024). Kontribusi Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Tahun 2022 terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) sebesar 28,47%, tahun 2023 sebesar 28,06%, tahun 2024 sebesar 28,06% dan tahun 2025 sebesar 28,06%. Dari angka capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) sebagai penyumbang terbesar terhadap Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 (dua) Tahun berturut - turut. Kontribusi per sub sektor terhadap PDRB Sektor Pertanian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian di
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2025

No	Sub Sektor	Tahun			
		2022	2023	2024	2025*
1	Tanaman Pangan	11,34	11,57	11,57	11,57
2	Tanaman Hortikultura Semusim	0,84	0,90	0,90	0,90
3	Perkebunan Semusim	0	0	0	0
4	Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,22	1,12	1,12	1,12
5	Perkebunan Tahunan	11,67	11,09	11,09	11,09
6	Peternakan	2,80	2,80	2,80	2,80

7	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,59	0,58	0,58	0,58
Total		28,47	28,06	28,06	28,06

Catatan :* : Data Capaian Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan bahwa sub sektor perkebunan Tahunan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian yang kemudian diikuti oleh sub sektor tanaman pangan, peternakan, tanaman hortikultura Tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim dan jasa pertanian dan perburuan. Sub sektor perkebunan Tahunan banyak disumbangkan pada komoditi kelapa sawit dan tanaman pangan pada komoditi padi dan jagung.

b) Indikator Pada Aspek Pelayanan Umum

Indikator pada Aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yaitu Layanan Urusan Wajib Dasar dan Layanan Urusan Pilihan. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewenangan Layanan Urusan Pilihan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Layanan Urusan Pilihan sektor pertanian yang terdiri dari 2 (dua) IKK seperti pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per Tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per tahun}}{\text{Luas panen}}$
2	Pertanian	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun } n - \text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun } n-1)}{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun } n-1} \times 100\%$

Sumber: Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024, Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Data capaian realisasi IKK urusan pemerintahan sektor pertanian dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Realisasi IKK Urusan Pemerintahan Sektor Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Realisasi IKK			
				2022	2023	2024	2025*
1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per Tahun	Ku/ha	68,90	61,60	56,92	63,67
2	Pertanian	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,86	-81,26	4,52	4,73

Catatan :* Data sementara

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKK produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2025 masih angka sementara dan mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 7,57% (dari 56.92 ku/ha menjadi 61,23 ku/ha),

meningkatnya produktivitas pertanian per hektar per tahun karena meningkatnya produktivitas padi sawah dari 48,35 ku/ha tahun 2024 menjadi 50,60 ku/ha tahun 2025. Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 8,26% (dari 61,60 ku/ha menjadi 56,92 ku/ha), hal ini disebabkan turunnya produktivitas padi dan jagung yang mana pada tahun 2022 produktivitas padi tahun 2023 sebesar 5,20 ton/ha menjadi 4,80 ton/ha tahun 2024 dan jagung dari 8,66 ton/ha pada tahun 2023 menjadi 7,40 ton/ha tahun 2024.

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dari -81,26% pada tahun 2023 menjadi 4,52% tahun 2024. Selama tahun 2024 jumlah kasus penyakit jembrana mengalami peningkatan kejadian sebesar 85,68% dari tahun 2023. Capaian tahun 2025 sebesar 4,73% (data sementara) mengalami peningkatan sebesar 0,21% jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadinya peningkatan kasus penyakit hewan menular tahun 2025 dikarenakan adanya kejadian penyakit baru yang tidak terjadi pada tahun 2024 yaitu penyakit Septichaemia Epizootica (SE) sebanyak 42 kasus yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Terpadu Padang Laban dan Puskesmas Terpadu Inderapura.

c) Indikator Kinerja Pada Aspek Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Melalui Laporan Evaluasi Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten pada kondisi triwulan IV tahun 2025, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2025 sebesar 107,22% dengan kategori “sangat tinggi”, sedangkan realisasi anggaran sebesar 60,69% dengan kategori “rendah”.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Seluruh sasaran yang ditetapkan sebagian besar dapat tercapai, bahkan beberapa diantaranya mampu melampaui target, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan; dan
3. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Rekomendasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi segera sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
2. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan; dan
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra tahun 2021-2026.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, dapat memperoleh gambaran kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang tahun 2025. Di masa mendatang, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Painan, 19 Januari 2026
Plh. Kepala Dinas



HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 002

**Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	26,80	25,70	25,70	24,68	24,68	24,68
2.	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	13,54	11,67	11,34	11,57	11,57	11,57
3.	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB (%)	11,03	11,83	11,67	11,09	11,09	11,09
4.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (kw/ha)	58,42	65,38	70,91	61,02	56,92	-
5.	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30	-
6.	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB (%)	2,56	2,74	2,80	2,80	2,80	2,80
7.	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30	-
8.	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	33,16	10,45	5,86	-81,26	4,52	-
9.	Cakupan Pengawasan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan (%)	100	100	100	100	100	-
10.	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,01	29,06	28,47	28,06	28,06	28,06
11.	Persentase Pertanian PerHertare Per Tahun	-	-	-	-	-	-
12.	Jumlah Kasus Zoonosis Yang Daporkan (Kasus)	134	148	155	310		

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Perencanaan (Rp)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Perencanaan (Rp)	Peringkat Daerah Penanggung Jawab
	I	II	III	IV			
6 K	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13	15 = 14 x 100%
	K	K	K	K	K	K	K
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13
	K	K	K	K	K	K	K
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	8	9	10	11	12	13	14 = 7 x 13
	K	K	K	K	K	K	K
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	7	8	9	10	11	12	13
	K	K	K	K	K	K	K
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

1. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan/kegiatan legislatif dan anggaran
 2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan/kegiatan legislatif dan anggaran
 3. Pelaksanaan program/kegiatan/kegiatan legislatif dan anggaran
 4. Pelaksanaan program/kegiatan/kegiatan legislatif dan anggaran
 5. Pelaksanaan program/kegiatan/kegiatan legislatif dan anggaran

Penyusunan RKPD berikutnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga target yang ditetapkan pada tahap RKPD bisa dicapai



REVISI
 19 Juni 2024
 PPK Pesisir Selatan
 NIP. 196003182019011602
 HENDRO YORUMAWAN, S.T.